

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor jasa keuangan, memiliki peranan yang penting dalam perkembangan ekonomi (Anwar et al, 2021.). Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat/nasabah. Perbankan di Indonesia, menerapkan kebijakan *dual banking system* yang mana bank dapat beroperasi secara konvensional ataupun syariah. Perbedaan mendasar dari bank konvensional dan bank syariah adalah sistem yang dipakai dalam pengembalian dan pembagian dana, baik dari nasabah ke bank maupun dari bank ke nasabah. Bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bunga seringkali dikaitkan dengan riba karena perolehan keuntungannya memiliki besaran yang sama tanpa memandang kondisi usaha nasabah sehingga sistem bunga ini dianggap tidak berkeadilan. Beda halnya dengan sistem bagi hasil dimana perolehan keuntungan berdasarkan omset usaha dimana keuntungan dibagi sesuai porsi yang telah disepakati. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dan masyarakat/nasabah dibebaskan untuk memilih.

Sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum, bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor dan menawarkan jasa pelayanan keuangan (Amirillah, 2010). Di Indonesia, bank syariah telah hadir selama 3 dekade dan menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Per Januari 2023, akumulasi aset bank syariah mencapai Rp 765.358 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 782.100 miliar.



**Gambar 1.1**

**Perkembangan Total Aset Bank Syariah di Indonesia Tahun 2020 - Januari 2023**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2023 (OJK)

Perkembangan bank syariah ini, diikuti oleh perkembangan BPRS yang turut berkembang pesat. Bank syariah merupakan pionir bagi pendirian lembaga keuangan syariah lainnya. Berikut grafik perkembangan BPRS dari tahun ke tahun.



**Gambar 1.2**

**Perkembangan Total Aset BPRS di Indonesia Tahun 2020 - Januari 2023**

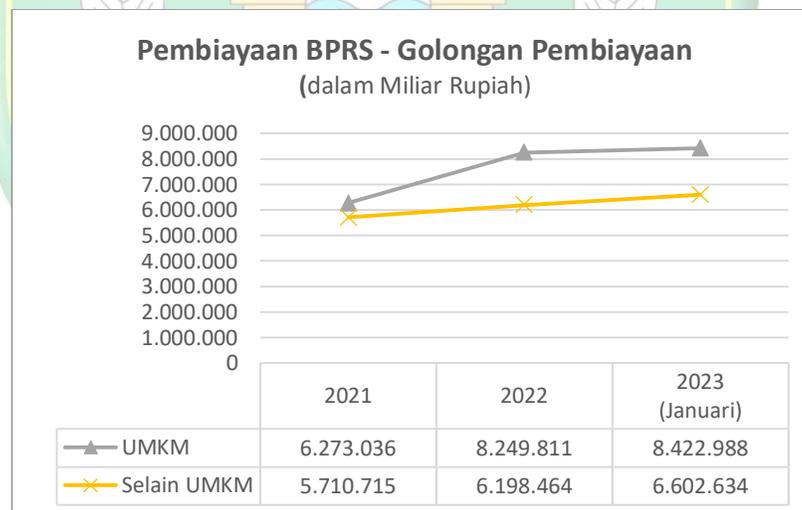
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2023 (OJK)

Per Januari 2023, aset BPRS di Indonesia mencapai 20.188 Miliar Rupiah. Meningkat dari tahun sebelumnya pada Desember 2022 sebesar 20.157 Miliar Rupiah. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya yakni 17.060 Miliar Rupiah (2021) dan 14.944 Miliar Rupiah (2020). Dalam beberapa tahun ke belakang, BPRS mengalami tren kenaikan jumlah BPRS yang

signifikan. Hingga saat ini, BPRS di Indonesia telah ada sebanyak 169 BPRS (OJK, 2023).

Dasar pendirian BPR Syariah ini berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan serta Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketika awal mula berdiri, BPR Syariah ini dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kemudian setelah hadirnya UU No.21 Tahun 2008, terjadi perubahan menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BPRS memiliki jangkauan pasar yang berbeda dengan Bank Umum Syariah (BUS). Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, jangkauan pasar BPRS menjangkau pasar mikro yang menjadi salah satu alternatif pendanaan UMKM (Muhtadi, 2016). Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS mayoritas disalurkan ke UMKM. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan penyaluran pembiayaan pada BPRS di dominasi pada sektor UMKM.



**Gambar 1.3**

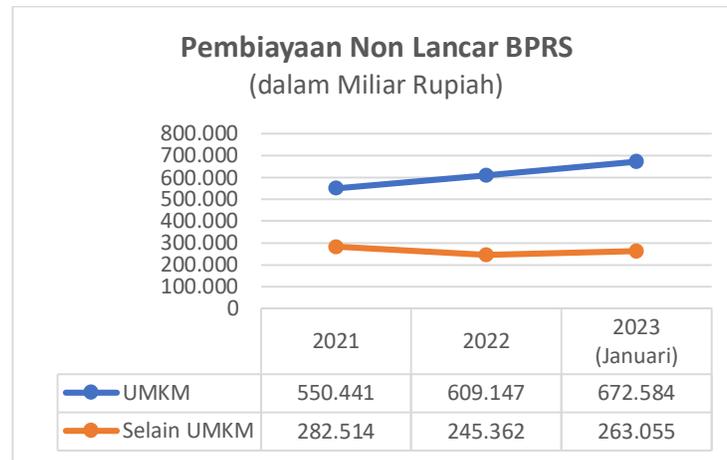
**Pembiayaan BPRS Berdasarkan Golongan Pembiayaan**  
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2023 (OJK)

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu ataupun sekelompok orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (UU No.20 Tahun 2008). Meski hanya sebatas usaha dalam skala kecil, UMKM berkontribusi besar

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Per tahun 2023 sektor UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun (Menko RI, 2023). Sebagian usaha UMKM adalah usaha skala rumah tangga dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Menko RI (2023) yang menyatakan bahwa per tahun 2023 UMKM telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97% dari total tenaga kerja. UMKM merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat, strategi BPRS yang mengarah ke pembiayaan UMKM telah tepat.

Ekspansi BPRS tak selamanya mulus karena seiring berubahnya regulasi akan sedikit banyaknya berpengaruh terhadap persaingan BPRS. Persaingan BPRS dengan BUS yang turut menasar ke UMKM juga, semakin kompetitif setelah beredarnya Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 yang menyatakan bahwa bank umum dalam negeri (baik negeri maupun swasta) serta bank asing harus mendukung pengembangan sektor UMKM dengan harus menyalurkan kredit untuk UMKM minimal 20%. Peraturan ini tentunya menjadi angin segar bagi sektor UMKM karena pemerintah telah memprioritaskan pengembangan sektor ini. PBI ini diharapkan mampu mendorong percepatan dan pengembangan UMKM. Namun, nyatanya perubahan tak selamanya menguntungkan berbagai pihak, ada kalanya dapat merugikan pihak lain seperti BPRS. Dengan ekspansi baru bank umum ke sektor mikro ini, menambah persaingan BPRS yang semakin kompetitif karena BPRS memiliki pangsa pasar yang sama yakni sektor mikro tetapi memiliki modal yang relatif kecil.

Selain persaingan yang semakin kompetitif, pembiayaan ke sektor mikro juga bukanlah tanpa resiko. Pengusaha UMKM mayoritas masih memiliki pengetahuan yang minim dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usahanya. Hal ini bisa jadi bumerang banyak terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut data perkembangan pembiayaan bermasalah (NPF) pada BPRS dalam 3 tahun terakhir.



**Gambar 1.4**

**Pembiayaan Non Lancar BPRS Tahun 2021-Januari 2023**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2023 (OJK)

Berdasarkan data diatas, banyaknya pembiayaan non lancar berasal dari UMKM dengan proporsi yang berjumlah 2 kali lipat dari pembiayaan non lancar selain UMKM. Padahal, pada tabel sebelumnya menyajikan bahwa proporsi pembiayaan UMKM dan selain UMKM tidaklah berbeda signifikan meski di ungguli oleh UMKM. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan ke sektor mikro amat rentan bermasalah. Jika ini terus berlanjut, maka efisiensi kinerja keuangan BPRS akan terganggu dan secara perlahan mengganggu keberlanjutan BPRS. Hal ini diperburuk oleh dampak dari kebijakan penanganan pandemi covid-19 pada tahun 2020-2022 yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi dan secara tidak langsung berdampak pada lembaga jasa keuangan karena mengakibatkan daya beli konsumen serta kemampuan membayar pembiayaan nasabah menjadi menurun. Penelitian efisiensi sangat perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan BPRS dalam menahan gejolak internal ataupun eksternal demi menjaga sustainabilitasnya.

Efisien merupakan suatu standar penting dalam mengukur kinerja suatu perusahaan (Abidin et al., 2009). Suatu perusahaan dikatakan efisien ketika: (1) menggunakan input yang sama, tapi mampu memproduksi output yang lebih besar; (2) menggunakan input yang lebih sedikit, tapi mampu memproduksi output yang tetap sama ketika tanpa mengurangi input; (3) menggunakan input yang lebih banyak, tapi mampu memproduksi output

yang lebih banyak pula. Efisiensi berkaitan erat dengan profitabilitas. Semakin efisien bank maka akan semakin besar profit yang didapat.

Diantara faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank adalah kinerja keuangan yang tercermin pada rasio-rasio keuangan. Profitabilitas bank tercermin pada *Return On Aset* atau ROA. Berdasarkan penelitian Uswatun Khasanah, dkk (2022), FDR, NPF, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank. Variabel NPF dan FDR secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Variabel BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Jika NPF, FDR, BOPO berpengaruh terhadap ROA, maka keempat variabel tersebut diduga juga berpengaruh terhadap efisiensi karena inti dari efisiensi adalah menghasilkan profit optimal. Kajian efisiensi perbankan (khususnya BPRS) sangat perlu dilakukan karena menyangkut sustainabilitas bank yang mengelola dana nasabah.

Penelitian terkait efisiensi bank syariah ataupun BPRS telah banyak dilakukan, baik menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini (DEA) ataupun berbeda. Ada juga yang bahkan meneliti hingga *Two Stage DEA* yang menguji faktor lingkungan (rasio keuangan) yang mempengaruhi efisiensi. Meski demikian, belum terdapat penelitian yang mengukur efisiensi BPRS di Jawa Barat serta faktor yang mempengaruhinya. Peneliti tertarik mengisi *gap* ini dengan mengadakan penelitian serupa, tetapi dengan wilayah kajian yang berbeda, yakni di Jawa Barat. Alasan empiris peneliti tertarik mengkaji BPRS di Jawa Barat karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki persaingan ketat antara BPRS dengan Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini karena akses ke BUS di Jawa Barat ini relatif mudah, sehingga BUS lebih mudah bersaing dengan BPRS karena memiliki aset yang lebih besar. BPRS harus tetap *survive* di persaingan yang semakin kompetitif ini dengan BUS. Diantara salah satu cara untuk menganalisis kemampuan *survive* BPRS yaitu dengan pengukuran efisiensi. Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur efisiensi BPRS Jawa Barat serta beberapa faktor internal yang diduga berpengaruh. Selain itu, pada

penelitian ini juga menganalisis implikasi atas efisien/tidak efisiennya BPRS Jawa Barat.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi masalah**

Dari latar belakang diatas, adapun pengidentifikasian masalahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang tersalurkan oleh BPRS di dominasi ke UMKM
- b. Pembiayaan bermasalah terbesar didominasi oleh UMKM dengan jumlah yang hampir 2 kali lipatnya dari pembiayaan bermasalah pada selain UMKM
- c. Persaingan BPRS dengan BUS semakin kompetitif setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 yang menyatakan bahwa bank umum dalam negeri (baik negeri maupun swasta) dan bank asing harus turut membantu pemerintah dalam pengembangan UMKM dengan penyaluran kredit UMKM minimal 20%.
- d. Akses Bank Umum Syariah di wilayah Jawa Barat relatif mudah sehingga BPRS Jawa Barat menjadi salah satu yang terdampak ekspansinya bank umum ke sektor mikro.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian tentang efisiensi sangat perlu dilakukan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan kajian evaluasi BPRS di Jawa Barat.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini bertujuan mengukur efisiensi kinerja keuangan BPRS serta faktor yang mempengaruhinya. Untuk pengujian faktor yang diduga berpengaruh terhadap efisiensi BPRS Jawa Barat, peneliti membatasinya dalam lingkup faktor internalnya saja, yakni rasio

keuangannya. Adapun untuk faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tidak akan diuji pada penelitian ini karena diasumsikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia sudah stabil meski berfluktuatif.

### 3. Rumusan Masalah

Dengan demikian, adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Bagaimana skala efisiensi BPRS di Jawa Barat tahun 2019-2022?
- b. Apa penyebab ketidakefisienan (inefisiensi) pada BPRS di Jawa Barat selama tahun 2019-2022?
- c. Bagaimana pengaruh NPF terhadap skala efisiensi BPRS di Jawa Barat selama tahun 2019-2022?
- d. Bagaimana pengaruh ROA terhadap skala efisiensi BPRS di Jawa Barat selama tahun 2019-2022?
- e. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap skala efisiensi BPRS di Jawa Barat selama tahun 2019-2022?
- f. Bagaimana pengaruh FDR terhadap skala efisiensi BPRS di Jawa Barat selama tahun 2019-2022?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis tingkat efisiensi BPRS di Jawa Barat tahun 2019-2022.
- b. Untuk menganalisis penyebab inefisiensi BPRS di Jawa Barat tahun 2019-2022.
- c. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap tingkat efisiensi BPRS Jawa Barat selama tahun 2019-2022.
- d. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap tingkat efisiensi BPRS Jawa Barat selama tahun 2019-2022.

- e. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap tingkat efisiensi BPRS Jawa Barat selama tahun 2019-2022.
- f. Untuk menganalisis pengaruh FDR terhadap tingkat efisiensi BPRS Jawa Barat selama tahun 2019-2022.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan hadirnya penelitian ini, penulis berharap dapat menghadirkan manfaat baik manfaat dari sisi teoritis maupun praktis.

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah literatur keilmuan ekonomi islam serta dapat menambah wawasan bagi penulis pada khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. Penelitian ini merupakan integrasi dari pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan yang kemudian dimuat dalam tugas akhir ini.

### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan BPRS di Jawa Barat dan sebagai literatur bagi pembaca yang berkepentingan atau tertarik mendalami kinerja keuangan BPRS di Jawa Barat.

## D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna memudahkan pembaca memahami maksud serta penyajian penelitian yang telah diuraikan peneliti. Adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Pada bab ini berisi uraian teori yang digunakan sebagai dasar penelitian; serta menguraikan penjelasan masing-masing variabel, penelitian terdahulu, serta kerangka

pemikiran yang menggambarkan secara sederhana permasalahan yang diteliti.

### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Pada bab ini membahas rancangan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, beserta rencana penelitian. Bab ini merupakan penggambaran langkah-langkah penelitian.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang mencakup uraian hasil olah data penelitian dan temuan data penelitian. Data yang ada dianalisis secara inferensial kemudian diakhir sub akan dijadikan sebagai bahan refleksi atas evaluasi kinerja keuangan BPRS di Jawa Barat.

### **BAB V : Penutup**

Pada bab yang terakhir ini mencakup kesimpulan yang akan menguraikan secara ringkas dan sederhana dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga akan disampaikan saran dari peneliti untuk penelitian berikutnya jika hendak meneruskan penelitian ini.

